

Ombusman Usut Dugaan Pungli Di Lapas Serang

written by Kabar 6 | 14 Mei 2019



Kabar6-Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Lapas Klas II A Serang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang mendapat perhatian Ombusman Republik Indonesia.

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut mengaku akan mengecek temuan tersebut.

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengaku, sudah mendapat informasi terkait dugaan pungli di Lapas Klas II A Serang.

Menurut Andrianus, kendati baru dugaan, Ombusman akan melakukan pengecekan terhadap dukan Pungli itu sesuai dengan tugas dan fungsi Ombusman.

“Biasanya sih hal itu (informasi dugaan pungli red), ada kebenarannya dalam situasi Lapas sekarang. Hal itu amat mungkin,” kata Andrianus kepada wartawan melalui telepon,

Selasa (14/5/2019).

Selain akan mengecek, kata Andrianus, Ombusman akan segera melaporkan dugaan Pungli di Lapas Klas II A Serang ini ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM RI) melalui Direktorat Jendral Pemasayarakatan (Dirjen PAS).

“Kami akan informasikan ke Dirjen PAS agar dibenahi. Mereka (Dirjen PAS red) selalu terima bila diingatkan,” tutupnya.

Dugaan Pungli di Lapas Klas II A Serang itu, menarik perhatian aktivis antikorupsi dari Banten Bersih, Aco Ardiansyah.

Menurut Aco, Kemenhum RI harus segera menindaklanjuti dugaan Pungli tersebut. Selain itu, Aco juga meminta Satgas Saber Pungli untuk segera turun untuk melakukan pengusutan.

“Jika dugaan itu benar, saya minta Kemenhumkam segera melakukan pemecatan terhadap oknum-oknum yang terlibat,” tegas Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) ini dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Menurut Aco, Lapas dan Rutan harus bersih dari Pungli karena lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tersangkut hukum.

Selain itu, penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Narapidana itu sudah ada aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab perawatan tahanan.

“Didalam peraturan itu, Lapas atau Rutan wajib memenuhi hak-hak para tahanan sebagaimana prinsip HAM,” tuturnya.

Aco mengungkapkan, Lapas dan Rutan sebagai lembaga pemerintah wajib memberikan pelayanan yang layak kepada seluruh elemen masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, petugas Lapas dan Rutan harus bersih dari kejahatan yang bersifat korupsi.

“Sekali lagi, jika dugaan Pungli itu benar terjadi. Potret itu menunjukkan bahwa manajemen Lapas rusak. Hal itu tentu meyimpang dari tujuan awal dibentuknya Lapas. Yang salah satunya, melakukan pembinaan terhadap Narapidana,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Akademi Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan meminta, aktivitas anti korupsi di Banten untuk mengungkap dugaan Pugli di Lapas II A Serang.

Hal itu penting dilakukan agar Kemenhumkam bersih dari segala perilaku koruptif.

“Saya sudah dorong aktivis anti korupsi di Banten untuk membongkar dugaan Pungli di Lapas II A Serang bro (meyebut wartawan red),” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Narapidana Narkoba Lapas II A Serang ME (bukan nama sebenarnya) mengeluhkan, pungutan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

“Di dalam Lapas II A Serang semuanya bayar 0m (menyebut wartawan-red). Enggak ada yang gratis,” ungkap ME saat menghubungi wartawan melalui pesan whatsapp, Minggu (12/5/2019).

Sementara itu, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Klas II A Serang Muhammad Askari Utomo membantah ada pungutan terhadap narapidana di Lapas Klas II A Serang.

Menurutnya, pihaknya banyak menemukan fakta banyak narapidana meminta uang ke orangtua dengan alasan untuk membayar biaya kamar dan fasilitas lainnya di lapas hanya akal-akal agar bisa mendapatkan uang.**Baca juga: [Dugaan Pungli Di Lapas Serang Mencuat.](#)

“Kita tidak pernah meminta uang ke narapidana. Kemungkinan itu hanya alasan narapidana agar dapat uang dari orang tuanya,” katanya melalui telepon, Senin (13/5/2019).(Vee)

Ombusman, Banyak Pelayanan Publik di Banten Belum Memenuhi standar

written by Kabar 6 | 14 Mei 2019



Kabar6-Sejumlah pelayanan publik di Provinsi Banten dinilai masih banyak yang belum memenuhi standar.

Demikian hal itu dikatakan Kepala perwakilan (Kaper) ombudsman RI Banten Bambang P Sumo disela-sela acara kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten bertempat di Hotel Arya Duta Karawaci Tangerang, Banten hari Jumat (29/3/2019).

Ombudsman RI Banten, Bambang mengatakan, banyak pelayanan di Provinsi Banten yang belum memenuhi standar pelayanan publik

sebagaimana yang ditetapkan.

Bambang mencontohkan, seperti pelayanan perekaman e KTP yang masih belum bagus, karena masih ada yang antri berjam-jam bahkan acak-acakan dan ini didasarkan pada hasil pemantauan Ombudsman dari bulan lalu.

Itu sebabnya pihaknya akan terus mengingatkan para penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan pelayanannya.

Meski begitu, Ombudsman juga menilai kinerja Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam menyelesaikan berbagai upaya pelayanan publik sudah cukup baik dan dapat dirasakan kemajuan dan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik, bahkan terbukti ia turun langsung ke lapangan secara teknis, hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khoiron yang menyatakan jika capaian 99,10 persen perekaman eKTP di Prov Banten termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Sehingga Provinsi Banten terlihat serius dalam menanggapi berbagai pelayanan di masyarakat. Hal ini dibutuhkan komitmen keras para Kepala Daerah khususnya dalam mensukseskan Pemilu 2019.

“Ini kewajiban moral Komisi II dalam membangun situasi bersama menjelang Pemilu dan mensukseskan Pemilu 2019.

Tiga hal yang ia agendakan dalam reses ini adalah akses pemilih dari data e KTP yang sesuai dengan DP4 Kemendagri, soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang adil, jujur dan legitimet, dan hal2 yang terkait dengan rekrutmen CPNS di Pemprov Banten.

“Saya yakin kalau Gubernur Banten memiliki komitmen kuat terhadap ke tiga hal tersebut”, pungkasnya.**Baca juga: [Earth Hour 2019, Yuk Padamkan Lampu dan Barang Elektronik Untuk Hemat Energi.](#)

Disamping itu, lanjut Herman, pihaknya juga telah banyak melihat berbagai pelayanan publik yang berkaitan dengan infrastruktur mulai banyak dirasakan masyarakat. Ia berharap, hal ini dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.(Den)